



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2018
OPD DISPERMADES**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 232 dan pasal 294, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Bab,II pasal 2 dan Peraturan Bupati Batang Nomor 87 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017 diamanatkan bahwa setiap Entitas Akuntansi wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja OPD.

OPD yg tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dibidang Pemberdayaan Masyarakat, adalah merupakan entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran; Neraca;Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan LRA, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya. Neraca menyajikan asset, utang, dan ekuitas yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan operasional menyajikan pendapatan LO dan beban, yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas menyajikan ekuitas awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari laporan operasional (LO) yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas OPD.

Guna menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan, perlu dibuat catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan keuangan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan dimaksud adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.



1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud Laporan Keuangan OPD Dispermades yang meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengikuti laporan tersebut adalah sebagai bentuk petanggungjawaban pengelolaan keuangan OPD Dispermades Kabupaten Batang selama satu periode Tahun Anggaran 2018.

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas ekonomi, sosial, maupun politik, berupa posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan Tahun Anggaran 2018.

1.1. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018 disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan



- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4028);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4540);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 4219);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Batang tahun 2017 Nomor 12);



26. Peraturan Bupati Batang Nomor 87 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Batang tahun 2016 Nomor 87);
27. Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Batang tahun 2016 Nomor 86);
28. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Batang tahun 2017 Nomor 45).
29. Peraturan Bupati Batang Nomor 69 tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 69);
30. Peraturan Bupati Batang Nomor 70 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 70);

1.2. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2018 memuat penjelasan dan atau catatan atas laporan keuangan dalam periode Tahun Anggaran 2018 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

- 2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 3.1. Laporan Realisasi Anggaran
 - 3.1.1 Pendapatan LRA
 - 3.1.2 Belanja
- 3.2. Neraca
 - 3.2.1. Aset



3.2.2. Kewajiban

3.2.3. Ekuitas

3.3. . Laporan Operasional

3.3.1. Pendapatan LO

3.3.2. Beban

3.3.3. Surplus / Defisit Kegiatan Operasional

3.4. Laporan Perubahan Ekuitas

3.4.1. Ekuitas Awal

3.4.2. Surplus / Defisit LO

3.4.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan
Mendasar

3.4.4. Ekuitas Akhir

Bab IV Penjelasan atas Informasi – informasi Non Keuangan.

Bab V Penutup.



BAB II **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan OPD Dispermades Kabupaten Batang diklasifikasikan menjadi urusan wajib dan pilihan, dan di sajikan secara ringkas pada tabel realisasi pendapatan dan realisasi belanja.

Realisasi Pendapatan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Klasifikasi Urusan Wajib Dan Pilihan OPD DISPERMADES Tahun 2018

NO. REK	URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	SALDO	
				(Rp.)	%
01	Urusan Wajib	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Urusan Pilihan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Realisasi Belanja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Klasifikasi Urusan Wajib Dan Pilihan OPD DISPERMADES Tahun 2018

NO. REK	URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	SALDO	
				(Rp.)	%
01	Urusan Wajib	6.891.972.111,00	6.072.127.184,00	819.844.927,00	88,10
02	Urusan Pilihan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	6.891.972.111,00	6.072.127.184,00	819.844.927,00	88,10

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target urusan umum pemerintahan pada OPD DISPERMADES Kabupaten Batang yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan

Pendapatan tidak mencapai target disebabkan karena :

1. -
2. -



3. Dst

Pendapatan melebihi target disebabkan karena : (Diberi penjelasan yang lebih dari 10%)

1. -
2. -
- 3 dst

Belanja tidak terserap (yang lebih dari 10%) disebabkan karena :

1. -
2. -
- 3..dst



BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD DISPERMADES

Bab ini membahas secara rinci mengenai akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

3.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas akun pendapatan dan belanja .

Uraian selengkapnya masing-masing akun laporan realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

3.1.1. Pendapatan LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening umum kas daerah yang menambah Saldo Anggaran lebih pada periode anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pengakuan pendapatan-LRA menggunakan basis kas,

3.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas: 1) pendapatan pajak daerah; 2) retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) lain-lain PAD yang sah.

Realisasi PAD Tahun 2018 serta perbandingannya dengan realisasi Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

	2018		2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<i>Pendapatan Asli Daerah</i>			
1 Pajak Daerah	-	-	-
2 Hasil Retribusi Daerah	-	-	-
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
4 Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-
	-	-	-

Realisasi masing-masing jenis PAD Tahun Anggaran 2018 dan 2017 diuraikan sebagai berikut:



3.1.1.1.1 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Batang dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Realisasi PAD selama TA 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

3.1.1.1.2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan PAD yang berasal dari hasil penyertaan modal Pemerintah Kabupaten berupa bagian laba dari lembaga keuangan bank dan bukan bank adalah sebagai berikut :

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan :	2018		2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Perusahaan Daerah Air Minum	0	0	0
Perusda Aneka Usaha	0	0	0
BPR/BKK Batang dan Bapera	0	0	0
Koperasi Serba Usaha Batang	0	0	0
Cemerlang	0	0	0
Bank Jateng	0	0	0
Deviden Bank Jateng	0	0	0
	0	0	0

Realisasi bagian laba atas penyertaan modal berdasarkan kas yang masuk ke rekening Kas Daerah (STS).

3.1.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang disahkan tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Lain-lain PAD yang Sah	2018		2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Hasil Penjualan aset daerah	0	0	0
Tidak Dipisahkan	0	0	0
Penerimaan Jasa Giro	0	0	0
Penerimaan Bunga Deposito	0	0	0
Tuntutan Ganti Rugi Daerah	0	0	0
Denda atas Keterlambatan Pelak.pekerjaa	0	0	0
Pendapatan denda retribusi	0	0	0
Pendapatan denda pajak	0	0	0
Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan	0	0	0
Pendapatan dari Pengembalian	0	0	0
Fasilitas sosial dan fasilitas umum	0	0	0
Pendapatan BLUD	0	0	0
Pendapatan Ganti Rugi	0	0	0
Pendapatan BPJS Kesehatan	0	0	0
	0	0	0



3.1.2. Belanja

Belanja adalah semua Pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Apabila dilihat dari Anggaran Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 6.891.972.111,- maka realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 6.072.127.184,- atau 88,10%, terjadi penghematan Belanja sebesar Rp. 819.811.927,- atau 11,90%. Ini diakibatkan karena adanya efisiensi dari beberapa kegiatan, juga adanya kegiatan yang belum selesai dilaksanakan dalam anggaran tahun 2018 dan dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2018 yaitu kegiatan Belanja Pegawai Tambahan Penghasilan PNS dan Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli.

Anggaran dan realisasi belanja OPD Dispermades tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)	%
1	BELANJA OPERASI	6.617.090.111,00	5.852.789.264,00	764.300.847,00	88,45
2	BELANJA MODAL	274.882.000,00	219.337.920,00	55.544.080,00	79,79
	JUMLAH	6.891.972.111,00	6.072.127.184,00	819.844.927,00	88,10

Dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2017 maka realisasi belanja tahun 2018 turun sebesar Rp. 471.620.004,- atau 7,7%. Perbandingan realisasi belanja daerah tahun 2018 dengan realisasi tahun 2017 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	2018		2017	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	6.617.090.111,00	5.852.789.264,00	6.261.572.188,00	-6,98
2	Belanja Modal	274.882.000,00	219.337.920,00	282.175.000,00	-28,6
	JUMLAH	6.891.972.111,00	6.072.127.184,00	6.543.747.188,00	-7,77

Berikut penjelasan untuk masing-masing kelompok belanja

3.1.2.1 BELANJA OPERASI

Belanja operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan. Belanja operasi OPD Dispermades meliputi belanja pegawai dan belanja barang dengan rincian sebagai berikut:

<i>Belanja Operasi:</i>	2018		2017	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	3.851.615.511,00	3.528.021.778,00	3.461.998.558,00	1,87
Belanja Barang	2.765.474.600,00	2.324.767.486,00	2.799.573.630,00	(20,42)
	6.617.090.111,00	5.852.789.264,00	6.261.572.188,00	(6,98)



Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja operasi Tahun 2018 lebih rendah Rp. 764.300.847,- atau 88,45%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017, realisasi belanja operasi Tahun 2018 lebih kecil Rp. 408.782.924,- atau 6,98%.

3.1.2.1. 1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan rincian anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

<i>Belanja Pegawai:</i>	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)	%
Belanja Tidak Langsung:					
Gaji dan Tunjangan	1.780.069.750,00	1.743.552.946,00	97,95	(36.516.804,00)	(2,05)
Tambahan Penghasilan PNS	768.471.361,00	744.633.932,00	96,90	(23.837.429,00)	(3,10)
	<u>2.548.541.111,00</u>	<u>2.488.186.878,00</u>	<u>97,63</u>	<u>(60.354.233,00)</u>	<u>(2,37)</u>
Belanja Langsung:					
Honorarium PNS	412.425.000,00	378.025.000,00	91,66	(34.400.000,00)	(8,34)
Honorarium Non PNS	873.325.000,00	644.500.000,00	73,80	(228.825.000,00)	(26,20)
Uang Lembur	7.524.400,00	7.509.900,00	99,81	(14.500,00)	(0,19)
Belanja pegawai BLUD	-	-	-	-	-
	<u>1.293.274.400,00</u>	<u>1.030.034.900,00</u>	<u>79,65</u>	<u>(263.239.500,00)</u>	<u>(20,35)</u>

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi belanja pegawai tahun 2018 sebesar Rp. 2.488.186.878,- (97,63%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 60.354.233,- (2,37%). Realisasi belanja pegawai yang tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp. 60.354.233,-, diantaranya diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan tunjangan PNS. Realisasi belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp. 967.330.300,-, diantaranya dalam bentuk honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim dan honorarium peserta kegiatan dan, lembur.

Berikut kami sampaikan penjelasan masing-masing belanja sebagai berikut :

1) Belanja Tidak Langsung :

- Gaji dan tunjangan tidak terserap sebesar Rp. 36.516.804,- dikarenakan ada pegawai yang pensiun.
- Tambahan penghasilan PNS tidak terserap sebesar Rp. 23.837.429,- dikarenakan ada pegawai yang pensiun.
- Belanja lain pimpinan dan anggota DPRD serta KDW/WKDH tidak terserap sebesar Rp. 0,-
- Biaya pemungutan pajak daerah tidak terserap sebesar Rp. 0,-



2) Belanja Langsung.

- a) Honorarium PNS tidak terserap sebesar Rp. 34.400.000,- dikarenakan sudah dibiayai dari belanja perjalanan dinas..
- b) Honorarium non PNS tidak terserap sebesar Rp. 228.825.000,- dikarenakan insentif yang direncanakan awal tahun selama 12 bulan, dikarenakan kegiatan dilaksanakan diakhir tahun, maka insentif tidak seluruhnya diberikan.
- c) Uang lembur tidak terserap sebesar Rp. 14.500,- dikarenakan pekerjaan sudah selesai dan efisiensi.
- d) Belanja pegawai BLUD tidak terserap sebesar Rp. 0,-

3.1.2.1.2. Belanja Barang

Anggaran dan realisasi belanja barang Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

<i>Belanja Barang:</i>	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)	%
Belanja Bahan Pakai Habis	323.036.150,00	301.672.077,00	93,39	(21.364.073,00)	(6,61)
Belanja Bahan/Material	66.850.000,00	60.798.500,00	90,95	(6.051.500,00)	(9,05)
Belanja Jasa Kantor	289.035.000,00	79.862.777,00	27,63	(209.172.223,00)	(72,37)
Belanja Premi Asuransi	-	-	-	-	-
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	126.375.000,00	121.899.517,00	96,46	(4.475.483,00)	(3,54)
Belanja Cetak Dan Penggandaan	274.615.300,00	273.399.700,00	99,56	(1.215.600,00)	(0,44)
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	74.510.000,00	65.660.000,00	88,12	(8.850.000,00)	(11,88)
Belanja Makan Minum	520.550.000,00	487.080.500,00	93,57	(33.469.500,00)	(6,43)
Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	15.900.000,00	15.042.000,00	94,60	(858.000,00)	(5,40)
Belanja Perjalanan Dinas	716.153.150,00	611.353.215,00	85,37	(104.799.935,00)	(14,63)
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	11.950.000,00	11.950.000,00	100,00	-	-
Belanja perjalanan pindah tugas	-	-	-	-	-
Belanja Pemeliharaan	34.000.000,00	33.699.200,00	99,12	(300.800,00)	(0,88)
Belanja Jasa konsultasi	-	-	-	-	-
Belanja Survey dan Penyusunan Design Engineering	-	-	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD	-	-	-	-	-
Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	97.000.000,00	96.850.000,00	99,85	(150.000,00)	(0,15)
Belanja Barang dan Jasa Dana JKN	-	-	-	-	-
Uang untuk diberikan kpd masy/pihak ketiga	70.500.000,00	70.500.000,00	100,00	-	-
Belanja jasa narasumber /instruktur/tenaga ahli/pembicara	145.000.000,00	95.000.000,00	65,52	(50.000.000,00)	(34,48)
Jumlah	2.765.474.600,00	2.324.767.486,00	84,06	(440.707.114,00)	(15,94)



Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa belanja barang pada tahun 2018 direalisasikan sebesar Rp. 2.324.767.486,- atau 84,06% dari anggaran yang telah ditetapkan dengan sisa anggaran sebesar Rp. 440.707.114,- atau 15,94%.

Berikut kami sampaikan penjelasan masing-masing belanja barang sebagai berikut :

- a) Belanja bahan pakai habis tidak terserap sebesar Rp. 21.364.073,- dikarenakan efisiensi.
- b) Belanja bahan/material tidak terserap sebesar Rp. 6.051.500,- dikarenakan efisiensi
- c) Belanja jasa kantor tidak terserap sebesar Rp. 209.172.223,- dikarenakan sesuai dengan kebutuhan
- d) Belanja premi asuransi tidak terserap sebesar Rp. 0,-
- e) Belanja perawatan kendaraan bermotor tidak terserap sebesar Rp. 4.475.483,- dikarenakan menyesuaikan harga BBM.
- f) Belanja cetak dan penggandaan tidak terserap sebesar Rp. 1.215.600,- dikarenakan efisiensi
- g) Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir tidak terserap sebesar Rp. 8.850.000,- dikarenakan efisiensi
- h) Belanja makan dan minum tidak terserap sebesar Rp. 33.469.500,- dikarenakan efisiensi
- i) Belanja pakaian dinas dan atributnya tidak terserap sebesar Rp. 858.000,- dikarenakan efisiensi
- j) Belanja perjalanan dinas tidak terserap sebesar Rp. 104.799.935,- dikarenakan efisiensi
- k) Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS tidak terserap sebesar Rp. 0,-
- l) Belanja pemeliharaan tidak terserap sebesar Rp. 300.800,- dikarenakan efisiensi
- m) Belanja jasa konsultasi tidak terserap sebesar Rp. 0,-
- n) Belanja survey dan penyusunan dengan engineering tidak terserap sebesar Rp. 0,-
- o) Belanja Barang dan Jasa BLUD tidak terserap sebesar Rp. 0,-
- p) Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat tidak terserap sebesar Rp. 150.000,- dikarenakan efisiensi.
- q) Belanja Uang yang akan diserahkan kpd masyarakat tidak terserap sebesar Rp. 0,-
- r) Belanja Barang dan jasa dana JKN tidak terserap sebesar Rp. 0,-



- s) Belanja jasa narasumber/instruktut/tenaga ahli/pembicara tidak terserap sebesar Rp. 50.000.000,- dikarenakan efisiensi

3.1.2.2 BELANJA MODAL

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya yang terdiri atas:

<i>Belanja Modal:</i>	Tahun 2018		Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Tanah	-	-	
Belanja Peralatan dan Mesin	265.882.000,00	215.387.920,00	282.175.000,00
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
Belanja Aset Lainnya			
	265.882.000,00	215.387.920,00	282.175.000,00

Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja modal Tahun 2018 lebih rendah Rp. 215.387.920,- atau 81,01%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017, realisasi belanja modal Tahun 2018 lebih kecil Rp. 66.787.080,- atau 23,67%.

Realisasi belanja modal sudah termasuk biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan perolehan aktiva tetap.

Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 sebesar Rp. 215.387.920,- tidak semua dicatat menjadi aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, hal ini karena sebagian aset tersebut dihibahkan ke OPD lain sebesar Rp. 109.537.920,-, dengan rincian sebagai berikut :

1. OPD Kelurahan Kauman
2. OPD Kelurahan Sambong
3. OPD Kelurahan Watesalit
4. OPD Kelurahan Kasepuhan
5. OPD Kelurahan Karangasem Utara
6. OPD Kelurahan Karangasem Selatan
7. OPD Kelurahan Proyonanggan Utara



8. OPD Kelurahan Proyonanggan Tengah

9. OPD Kelurahan Proyonanggan Selatan

Realisasi belanja modal berdasarkan obyek belanja disajikan pada tabel berikut:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/ (Kurang)	%
<i>Belanja Modal Pengadaan Tanah</i>			#DIV/0!		#DIV/0!
<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin :</i>			#DIV/0!		#DIV/0!
<i>Belanja Modal pengadaan alat-alat berat</i>			#DIV/0!		#DIV/0!
<i>Belanja Modal pengadaan alat-alat</i>			#DIV/0!		#DIV/0!
<i>Belanja Modal Pengadaan alat-alat bengkel</i>			#DIV/0!		#DIV/0!
<i>Belanja Modal pengadaan alat pertanian</i>			#DIV/0!		#DIV/0!
<i>Belanja Modal pengadaan alat-alat kantot</i>	265.882.000	215.387.920	81,01	50.494.080	18,99
<i>Belanja Modal pengadaan alat-alat studio</i>	9.000.000	3.950.000	43,89	5.050.000	56,11
<i>Belanja Modal Pengadaan alat-alat</i>			#DIV/0!		#DIV/0!
<i>Belanja Modal Pengadaan alat-alat ukur</i>			#DIV/0!		#DIV/0!
<i>Belanja Modal pengadaan alat-alat kedokteran</i>			#DIV/0!		#DIV/0!
<i>Belanja Modal pengadaan alat-alat laboratorium</i>			#DIV/0!		#DIV/0!
<i>Belanja Modal pengadaan alat-alat persenjataan/keamanan</i>			#DIV/0!		#DIV/0!
	274.882.000	219.337.920	79,79	55.544.080	20,21
<i>Belanja Modal Pengadaan</i>			#DIV/0!		
<i>Konstruksi/Pembelian Bangunan</i>			#DIV/0!	-	#DIV/0!
<i>Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan:</i>					
<i>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</i>					
<i>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</i>			#DIV/0!	-	#DIV/0!
<i>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</i>			#DIV/0!	-	#DIV/0!



Berikut kami sampaikan penjelasan realisasi masing-masing belanja modal dibandingkan dengan anggarannya sebagai berikut :

- 1) Belanja modal pengadaan tanah tidak terserap sebesar Rp. 0,-
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin :
 - a) Belanja modal pengadaan alat-alat berat tidak terserap sebesar Rp. 0,-
 - b) Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan tidak terserap sebesar Rp. 0,-
 - c) Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel tidak terserap sebesar Rp. 0,-
 - d) Belanja modal pengadaan alat-alat pertanian dan peternakan tidak terserap sebesar Rp. 0,-
 - e) Belanja modal pengadaan alat-alat kantor rumah tangga tidak terserap sebesar Rp. 50.494.080,- (18,99%) dikarenakan efisiensi
 - f) Belanja modal pengadaan alat-alat studio tidak terserap sebesar Rp. 5.050.000,- (56,11%) dikarenakan efisiensi
 - g) Belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi tidak terserap sebesar Rp. 0,-
 - h) Belanja modal pengadaan alat-alat ukur tidak terserap sebesar Rp. 0,-
 - i) Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran tdk terserap sebesar Rp. 0,-
 - j) Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium tidak terserap sebesar Rp. 0,-
 - k) Belanja modal pengadaan alat-alat persenjataan/keamanan tidak terserap sebesar Rp. 0,-



- 3) Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan tidak terserap sebesar Rp. 0,-

- 4) Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan :
 - a) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan tidak terserap sebesar Rp. 0,-
 - b) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan tidak terserap sebesar Rp. 0,-
 - c) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air tidak terserap sebesar Rp. 0,-
 - d) Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota tidak terserap sebesar Rp. 0,-
 - e) Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon tidak terserap sebesar Rp. 0,-

- 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya :
 - a) Belanja Modal pengadaan Buku/Kepustakaan tidak terserap sebesar Rp. 0,-
 - b) Belanja Modal pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan tidak terserap sebesar Rp. 0,-
 - c) Belanja Modal pengadaan Hewan, Ternak dan tanaman tidak terserap sebesar Rp. 0,-

- 6) Belanja Modal Aset Lainnya tidak terserap sebesar Rp. 0,-

3.2. NERACA

Neraca terdiri atas asset, kewajiban dan ekuitas. Uraian selengkapnya akun-akun dalam neraca adalah sebagai berikut :



3.2.1. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Pemerintah Kabupaten Batang yang ada di SKPD OPD Dispermades terbagi dalam :

<i>Uraian</i>	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
1. Aset Lancar	1.214.000,00	1.640.000,00
2. Investasi Jangka Panjang	-	
3. Aset Tetap	835.888.800,00	914.842.709,00
4. Aset Lainnya	49.725.000,00	49.725.000,00
	<u>886.827.800,00</u>	<u>966.207.709,00</u>

Berdasarkan rincian Aset di atas terlihat bahwa terjadi penurunan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batang di OPD Dispermades yaitu sebesar Rp. 78.953.909,- atau 8,63%.

3.2.1.1. ASET LANCAR

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dapat dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal neraca.

Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat dirinci sebagai berikut :



<i>Aset Lancar</i>	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1 Kas di Kasda	-	-
2 Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
3 Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
4 Kas di BLUD	-	-
5 Kas Lainnya	-	-
6 Piutang Pajak Daerah	-	-
7 Piutang Retribusi	-	-
8 Penyisihan Piutang tak tertagih	-	-
9 Belanja Dibayar Dimuka	-	-
10 Piutang Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	-	-
11 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
12 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
13 Piutang Lainnya	-	-
12 Persediaan	1.214.000,00	1.640.000,00
	<u>1.214.000,00</u>	<u>1.640.000,00</u>

3.2.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran berupa uang tunai maupun yang berada di rekening giro bank bendahara pengeluaran SKPD per 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2018(Rp)
a Sisa Uang Persediaan yang belum disetor ke Kas Daerah	-
b Hutang belanja dan hutang pajak	-
Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran	<u>-</u>

Penjelasan lebih rinci sebagai berikut :

- 1) Sisa Uang Persediaan yang belum disetor ke Kas Daerah

Sisa Uang Persediaan sebesar Rp. 0,- dan telah disetorkan ke Kas Daerah pada bulan Desember 2018.

- 2) Hutang belanja sebesar Rp. 0,-

3.2.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017 merupakan penerimaan pendapatan tahun 2017 yang belum disetor ke Kas Daerah termasuk pendapatan yang masih berada di pemungut sebesar Rp. 0,-.



3.2.1.1.3. Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja. Rincian saldo persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 di OPD Dispermades adalah sebagai berikut:

<i>Persediaan</i>	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1 Persediaan ATK/Pakai Habis	1.214.000,00	1.640.000,00
2 Persediaan Obat-obatan medis	-	-
3 Persediaan Obat-obatan ternak	-	-
4 Persediaan Rumah tangga	-	-
5 Persediaan Benda Berharga	-	600.000,00
6 Persediaan Lainnya	-	-
	<u>1.214.000,00</u>	<u>2.240.000,00</u>

Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (stock opname) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh pengurus barang masing-masing OPD Dispermades Nilai persediaan lainnya tersebut termasuk nilai persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. Sampai tanggal 31 Desember 2018 sudah semua diserahkan kepada masyarakat.

Berikut penjelasan dari masing-masing persediaan :

a) Persediaan alat tulis kantor

Persediaan alat tulis kantor per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.214.000,- dengan perincian terlampir.

b) Persediaan obat-obatan medis

Persediaan obat-obatan medis per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,-

c) Persediaan obat-obatan ternak.

Persediaan obat-obatan ternak per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,-

d) Persediaan Rumah Tangga.



Persediaan rumah tangga per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,

e) Persediaan benda berharga.

Persediaan benda berharga per 31 Desember 2018 sebesar
Rp. 0,-

f) Persediaan lainnya.

Persediaan lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,-

3.2.1.2. ASET TETAP

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Batang yang berada pada OPD Dispermades berupa aset tetap dengan masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Jumlah pada akun aset tetap sebesar Rp. 835.888.800,- merupakan nilai aset tetap sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dengan rincian kelompok aset tetap dan mutasi selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai berikut:

<i>Aset tetap</i>	Saldo awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir(Rp)
Tanah				-
Peralatan dan Mesin	2.136.372.688,00	109.350.000,00	-	2.245.722.688,00
Gedung dan Bangunan	796.411.000,00	-	-	796.411.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
Aset tetap lainnya	16.135.040,00	-	-	16.135.040,00
pengerjaan	-	-	-	-
Aset Tidak Berwujud	49.725.000,00	-	-	49.725.000,00
	2.998.643.728,00	109.350.000,00	-	3.107.993.728,00

Nilai aset tetap per 31 Desember 2018 di atas, telah didukung oleh Kartu Inventaris Barang SKPD.

Penambahan nilai aset terdiri atas (1) penambahan aset dari belanja modal; (2) penambahan aset yang berasal dari APBD Provinsi/APBN; (3) penambahan aset dari hibah; (4) penambahan aset dari hasil koreksi aset; (5) penambahan aset tetap dari hasil mutasi antar SKPD; (6) penambahan aset dari bukan belanja modal; (7) penambahan aset dari pindahan antar rekening; dan (8) penambahan aset dari lain-lain.



Pengurangan nilai aset terdiri atas (1) penghapusan aset tetap; (2) pengurangan aset karena mutasi antar SKPD; (3) pengurangan aset karena hibah; (4) pengurangan aset karena koreksi akuntansi hasil kodefikasi; (5) pengurangan aset karena rusak berat; (6) pengurangan aset karena extracomptable; (7) pengurangan aset karena pindahan antar rekening dalam SKPD; dan (8) Pengurangan aset karena lain-lain.

Rincian masing-masing komponen penambahan dan pengurangan aset tetap tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Penambahan aset tetap

a) Penambahan aset tetap dari belanja modal.

Penambahan aset tetap dari realisasi belanja modal tahun 2018 dapat dirinci sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<u>Realisasi Belanja Modal 2018 (Rp)</u>
1 Tanah	-
2 Peralatan dan Mesin	219.337.920,00
3 Gedung dan Bangunan	-
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
5 Aset tetap lainnya	-
6 Konstruksi dalam pengerjaan	-
	<u>219.337.920,00</u>

b) Penambahan aset tetap Pemerintah Kabupaten Batang dari dana APBD Provinsi/APBN

3 Gedung dan Bangunan	-
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
5 Aset tetap lainnya	-
6 Konstruksi dalam pengerjaan	-
	<u>-</u>

c) Penambahan aset tetap dari Hibah

Penambahan aset tetap dari Hibah dapat dirinci pada kelompok aset berikut ini :

3 Gedung dan Bangunan	-
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
5 Aset tetap lainnya	-
6 Konstruksi dalam pengerjaan	-
	<u>-</u>



- d) Penambahan aset tetap dari hasil Koreksi Aset , terdapat pada kelompok aset berikut ini :

<i>Uraian</i>	hasil koreksi aset
1 Tanah	-
2 Peralatan dan Mesin	-
3 Gedung dan Bangunan	-
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
5 Aset tetap lainnya	-
6 Konstruksi dalam pengerjaan	-
	-

- e) Penambahan aset tetap dari mutasi antar SKPD terinci pada kelompok aset sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	Mutasi Antar SKPD
1 Tanah	-
2 Peralatan dan Mesin	219.337.920,00
3 Gedung dan Bangunan	-
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
5 Aset tetap lainnya	-
6 Konstruksi dalam pengerjaan	-
	219.337.920,00

- f) Penambahan Aset dari Bukan Belanja Modal terinci pada kelompok aset tetap sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	Bukan Belanja Modal
1 Tanah	
2 Peralatan dan Mesin	
3 Gedung dan Bangunan	
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
5 Aset tetap lainnya	
6 Konstruksi dalam pengerjaan	
	-

Penambahan aset dari bukan belanja modal diantaranya karena adanya biaya-biaya yang terkait langsung dengan pengadaan barang namun dalam penganggarannya masih terletak di akun belanja pegawai dan akun belanja barang dan jasa.

- g) Penambahan Aset dari Pindahan antar Rekening terinci pada kelompok aset tetap sebagai berikut:

3 Gedung dan Bangunan	-
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
5 Aset tetap lainnya	-
6 Konstruksi dalam pengerjaan	-
	-



- h) Penambahan Aset dari lain-lain terinci pada kelompok aset tetap sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<i>Aset dari lain-lain</i>
1 Tanah	
2 Peralatan dan Mesin	
3 Gedung dan Bangunan	
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
5 Aset tetap lainnya	
6 Konstruksi dalam pengerjaan	
	-

Penambahan aset karena kondisi ini misalnya karena aset yang telah dimiliki SKPD belum tercatat dalam Kartu Inventaris Barang.

2. Pengurangan Aset tetap

- a). Pengurangan aset tetap karena penghapusan di tahun 2017 terinci pada kelompok aset sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<i>Penghapusan</i>
1 Tanah	-
2 Peralatan dan Mesin	-
3 Gedung dan Bangunan	-
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
5 Aset tetap lainnya	-
6 Konstruksi dalam pengerjaan	-
	-

- b). Pengurangan aset tetap karena mutasi ke SKPD lain terinci pada kelompok aset sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<i>mutasi Antar SKPD</i>
1 Tanah	-
2 Peralatan dan Mesin	109.537.920,00
3 Gedung dan Bangunan	-
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
5 Aset tetap lainnya	-
6 Konstruksi dalam pengerjaan	-
	109.537.920,00



c). Pengurangan aset tetap karena hibah terinci pada kelompok aset sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	HIBAH
1 Tanah	-
2 Peralatan dan Mesin	-
3 Gedung dan Bangunan	-
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
5 Aset tetap lainnya	-
6 Konstruksi dalam pengerjaan	-
	<u>-</u>

d). Pengurangan aset tetap karena SK Koreksi berada pada kelompok aset berikut ini :

<i>Uraian</i>	SK Koreksi
1 Tanah	-
2 Peralatan dan Mesin	-
3 Gedung dan Bangunan	-
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
5 Aset tetap lainnya	-
6 Konstruksi dalam pengerjaan	-
	<u>-</u>

e). Pengurangan aset tetap karena rusak berat terinci pada kelompok aset sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	Rusak berat
1 Tanah	-
2 Peralatan dan Mesin	-
3 Gedung dan Bangunan	-
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
5 Aset tetap lainnya	-
6 Konstruksi dalam pengerjaan	-
	<u>-</u>

f). Pengurangan aset tetap karena extracountable tahun 2018 terinci pada kelompok aset sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	Extracountable
1 Tanah	-
2 Peralatan dan Mesin	450.000,00
3 Gedung dan Bangunan	-
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
5 Aset tetap lainnya	-
6 Konstruksi dalam pengerjaan	-
	<u>450.000,00</u>



g). Pengurangan aset tetap karena pindahan antar rekening tahun 2018 terinci pada kelompok aset sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<u>Pindahan antar Rekening</u>
1 Tanah	
2 Peralatan dan Mesin	
3 Gedung dan Bangunan	
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
5 Aset tetap lainnya	
6 Konstruksi dalam pengerjaan	-
	<u>-</u>

h). Pengurangan aset tetap karena lain-lain terinci pada kelompok aset sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<u>Lain-Lain</u>
1 Tanah	
2 Peralatan dan Mesin	
3 Gedung dan Bangunan	
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
5 Aset tetap lainnya	
6 Konstruksi dalam pengerjaan	-
	<u>-</u>

3.2.1.2.1. Tanah

Nilai tanah pada umumnya merupakan nilai yang berasal dari penyajian neraca awal ditambah harga perolehan pada tahun berjalan. Nilai bersih tanah pada tahun 2018 pada SKPD OPD Dispermades dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1)..... M
 utasi Penambahan.
 Penambahan aset tanah pada tahun 2018 sebesar Rp. 0,- terdiri dari :
- a)..... B
 elanja Modal Tanah sebesar Rp. 0,-
- b)..... S
 elain dari Belanja Modal sebesar Rp. 0,- terdiri dari :
- J)..... H
 ibah sebesar Rp. 0,-
- J)..... K
 oreksi sebesar Rp. 0,-



- J..... A
 set dari belanja barang dan jasa sebesar Rp. 0,-
- J..... R
 eklasifikasi sebesar Rp. 0,-
- 2)..... M
 utasi Pengurangan
 Pengurangan aset tanah pada tahun 2018 sebesar Rp. 0,- terdiri dari :
- J..... K
 oreksi sebesar Rp. 0,-
- J..... R
 eklasifikasi sebesar Rp. 0,-
- J..... P
 enghapusan sebesar Rp. 0,-
- J..... D
 an yang lainnya sebesar Rp. 0,-

3.2.1.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai peralatan dan mesin yang disajikan di neraca daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 2.245.722.688,- naik sebesar Rp. 109.350.000,- atau 5,12% dibandingkan dengan nilai peralatan dan mesin dalam neraca tahun 2017 sebesar Rp. 2.136.372.688,-

Berikut daftar rincian peralatan dan mesin berdasarkan 9 jenis peralatan dan mesin:

<i>Peralatan dan Mesin</i>	Neraca		Naik (turun)
	Per 31 Des 2018	Per 31 Des 2017	
Alat-alat besar	14.450.000,00	-	14.450.000,00
Alat -alat angkutan	1.029.844.336,00	1.029.844.336,00	-
alat-alat bengkel dan alat ukur	-	-	-
alat-alat pertanian dan peternakan	-	-	-
alat-alat kantor dan rumah tangga	1.101.726.806,00	1.006.826.806,00	94.900.000,00
alat-alat studio dan komunikasi	99.701.546,00	99.701.546,00	-
alat-alat kedokteran	-	-	-
alat-alat laboratorium	-	-	-
alat-alat keamanan	-	-	-
	2.245.722.688,00	2.136.372.688,00	109.350.000,00

Nilai peralatan dan mesin pada tahun 2018 berasal mutasi penambahan dan pengurangan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Mutasi penambahan



Mutasi penambahan peralatan dan mesin tahun 2018 sebesar Rp. 219.337.920,- terdiri dari :

- a) Belanja Modal sebesar Rp. 219.337.920,-
- b) Selain Belanja Modal sebesar Rp. 0,- berasal dari :

Uraian	Mutasi Tambah (Rp)
SOTK BARU	-
APBN	-
APBD	-
Hibah	-
Koreks	-
Reklasifikasi	-
Aset dari belanja barang dan jasa	-
Mutasi dari SKPD	-
JUMLAH	-

2) Mutasi Pengurangan

Mutasi pengurangan nilai aset peralatan dan mesin pada tahun 2018 sebesar Rp. 109.537.920,- dengan perincian sebagai berikut :

	<u>Mutasi Kurang (Rp)</u>
1 Hibah	109.537.920,00
2 Koreksi	-
3 Rusak Berat	-
4 Extracountable	-
5 Reklasifikasi	-
	<u>-</u>

3.2.1.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan yang disajikan di neraca OPD Dispermades per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 796.411.000,- naik sebesar Rp. 0,- atau 0% dibandingkan dengan nilai gedung dan bangunan dalam neraca tahun 2016 sebesar Rp. 796.411.000,-

Nilai gedung dan bangunan pada tahun 2018 berasal dari mutasi penambahan dan pengurangan sebagai berikut :

- 1)..... M
 utasi penambahan



Mutasi penambahan aset gedung dan bangunan tahun 2017 sebesar Rp. 0,- terdiri dari :

- a)..... B
 belanja Modal sebesar Rp. 0,-
- b)..... S
 selain Belanja Modal sebesar Rp. 0,- dengan perincian sebagai berikut :

	<u>Mutasi Tambah (Rp)</u>
a APBN	-
b Hibah	-
c Koreksi	-
d Aset tidak dari Belanja Modal	-
e Pindahan antar rekening	-
	<u>-</u>
	<u>-</u>

- 2) Mutasi Pengurangan Gedung dan Bangunan
 Mutasi pengurangan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 0,- berasal dari:

	<u>Mutasi Kurang (Rp)</u>
1 Penghapusan	-
2 Koreksi	-
3 Extracountable	-
4 Reklasifikasi	-
	<u>-</u>
	<u>-</u>

3.2.1.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai jalan, irigasi dan jaringan yang disajikan di neraca daerah per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- naik sebesar Rp. 0,- atau 0% dibandingkan dengan nilai jalan, irigasi dan jaringan yang disajikan dalam neraca 2016 sebesar Rp. 0,-

Berikut daftar rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam neraca 2018 :

<i>Jalan, Irigasi dan Jaringan</i>	Neraca Per 31 Des 2017	Neraca Per 31 Des 2016	Naik (turun)
Jalan dan Jembatan	-	-	-
Bangunan air	-	-	-
Instalasi	-	-	-
Jaringan	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>



Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2018 berasal dari mutasi penambahan dan pengurangan sebagai berikut :

3)..... M
 utasi penambahan

Mutasi penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2018 sebesar Rp. 0,- terdiri dari :

a)..... B
 elanja Modal sebesar Rp. 0,-

b)..... S
 elain Belanja Modal sebesar Rp. 0,- dengan perincian sebagai berikut :

	<u>Nilai Perolehan (Rp)</u>
APBN	-
Hibah	-
Koreksi	-
Aset Tidak dari belanja Modal	-
pindahan antar rekening	-
	<u>-</u>

c)..... M
 utasi Pengurangan

Mutasi pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 0,- berasal dari:

	<u>Mutasi Kurang</u>
1) Hibah	-
2) Koreksi	-
3) Rusak Berat	-
4) Reklasifikasi	-
	<u>-</u>
	<u>-</u>

3.2.1.2.5. Aset tetap lainnya

Nilai aset tetap lainnya yang disajikan di neraca SKPD OPD Dispermades per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 16.135.040,- naik sebesar Rp. 0,- atau 0% dibandingkan dengan aset tetap lainnya yang disajikan dalam neraca 2017 sebesar Rp. 16.135.040,-

Berikut daftar rincian aset tetap lainnya berdasarkan jenisnya:

<i>Aset Tetap Lainnya</i>	Neraca Per 31	Neraca Per 31	Naik (turun)
	<u>Des 2018</u>	<u>Des 2017</u>	
Buku dan Kepustakaan	16.135.040,00	16.135.040,00	-
Barang Bercorak Seni, Kebudayaan	-	-	-
Hewan / Ternak dan Tumbuhan	-	-	-
	<u>16.135.040,00</u>	<u>16.135.040,00</u>	-



Niai Aset Tetap Lainnya pada tahun 2018 berasal dari mutasi penambahan dan pengurangan sebagai berikut :

a) M
 utasi penambahan

Mutasi penambahan aset tetap Lainnya tahun 2018 sebesar Rp. 0,-
 terdiri dari :

b) B
 elanja Modal sebesar Rp. 0,-

c) S
 elain Belanja Modal sebesar Rp. 0,- dengan perincian sebagai berikut
 :

b Hibah	-
c Koreksi	-
d Aset tidak dari Belanja Modal	-
e Reklasifikasi	-
	-
	-

d) Mutasi Pengurangan
 Mutasi pengurangan Aet Tetap Lainnya pada tahun 2018 sebesar Rp.
 0,- berasal dari:

	<u>Mutasi Kurang</u>
a Koreksi	-
b Reklasifikasi	-
c Lain-lain	-
	-
	-

3.2.1.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan yang tersaji di neraca OPD Dispermades per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,- sedangkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,-. Sehingga tidak ada perubahan.

3.2.1.2.7. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Nilai akumulasi Penyusutan Aset tetap pada neraca 2017 dan perbandingannya dengan restatement neraca tahun 2018 sebagai berikut :

	Neraca Per 31 Des 2018	Neraca Per 31 Des 2017 (AUDITED)	Naik (turun)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	2.222.379.928,00	2.034.076.019,00	188.303.909,00
	2.222.379.928,00	2.034.076.019,00	188.303.909,00
	2.222.379.928,00	2.034.076.019,00	188.303.909,00



3.2.1.3. ASET LAINNYA

Akun ini menggambarkan nilai tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, piutang retribusi, aset tak berwujud dan aset lain-lain dengan rincian saldo per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

<i>SKPD</i>	Neraca Per 31 Des 2018	Neraca Per 31 Des 2017	Naik (turun)
Piutang Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-
Kemitraan dengan Pihak ketiga	-	-	-
Aset tak Berwujud	49.725.000,00	49.725.000,00	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset lain-lain	-	-	-
	49.725.000,00	49.725.000,00	-

3.2.1.3.1. Aset tak berwujud

Aset tak berwujud SKPD OPD Dispermades per 31 Desember 2018 senilai Rp. 49.725.000,- berupa DED Bangunan Gedung Dispermades

3.2.1.3.2. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar (Rp. 0,-) pada tahun 2018 dan (Rp. 0,-) pada tahun 2017 terinci sbb:

<i>Jenis B arang</i>	Nilai	Thn Perolehan	Amortisasi 2017	Beban Amortisasi 2018	Amortisasi 2018
					-
					-
	-		-	-	-

3.2.1.3.3. Aset lain-lain

Aset lain-lain terdiri dari :

- 1) Barang rusak berat yang diusulkan untuk dihapuskan dicatat sebesar nilai bukunya dgn rincian sebagai berikut :



Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang belum menjadi hak pemerintah Daerah namun telah diterima di tahun 2018 sebesar Rp. 0,- dari pendapatan retribusi.

3.2.2.1.3. Hutang Belanja.

Meliputi Htang Tambahan Penghasilan Pegawai, Hutang listrik, telpon, speedy dan air bulan Desember 2018 yang baru dibayar bulan Januari 2018 sebesar Rp. 63.884.275,-

3.2.2.1.4. Hutang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp. 0,- meliputi :
utang retensi sebesar Rp. 0,- utang obat sebesar Rp. 0,-, gaji PTT yang belum dibayarkan sebesar Rp. 0,-, jasa medis yang belum dibayar Rp. 0,-.

3.2.3. EKUITAS

Ekuitas merupakan akun untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban SKPD OPD Dispermades sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	31 Desember 2018(Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Ekuitas	822.943.525,00	906.061.417,00
	<u>822.943.525,00</u>	<u>906.061.417,00</u>

3.3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

3.3.1. Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga



mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD.

Pada tahun 2018 Pendapatan-LO SKPD OPD Dispermades direalisasikan sebesar Rp. 0,- apabila dibandingkan dengan Pendapatan-LO pada tahun 2017 sebesar Rp. 0,- maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 0,- atau 0%.

Perbandingan Realisasi Pendapatan-LO pada tahun 2018 dengan tahun 2017 sebagai berikut :

	Tahun 2018	Tahun 2017	Kenaikan/ Penurunan	
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	(Rp)	%
1 Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	#DIV/0!
2 Pendapatan Transfer	-	-	-	#DIV/0!
3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	#DIV/0!
	-	-	-	#DIV/0!

Berdasarkan rincian Pendapatan Daerah di atas terlihat tidak ada kenaikan realisasi.

Penjelasan untuk masing-masing jenis pendapatan daerah diuraikan sebagai berikut :

3.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas: 1) pendapatan pajak daerah; 2) retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

Berikut rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah:

<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
1 Pajak Daerah	-	-	-	#DIV/0!
2 Hasil Retribusi Daerah	-	-	-	#DIV/0!
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	#DIV/0!
4 Pendapatan Asli Daerah lainnya	-	-	-	#DIV/0!
	-	-	0,00	#DIV/0!

3.3.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan



langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pendapatan Pajak Daerah selama Tahun 2018 & 2017 terdiri dari :

<i>Pendapatan Pajak Daerah:</i>	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/(Penurunan)	%
1 Pajak Hotel	-	-	-	#DIV/0!
2 Pajak Restoran	-	-	-	#DIV/0!
3 Pajak Hiburan	-	-	-	#DIV/0!
4 Pajak Reklame	-	-	-	#DIV/0!
5 Pajak Penerangan Jalan	-	-	-	#DIV/0!
6 Pajak Mineral Bukan Logam dan I	-	-	-	#DIV/0!
7 Pajak Parkir	-	-	-	#DIV/0!
8 Pajak Air Tanah	-	-	-	#DIV/0!
9 Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	#DIV/0!
10 Pajak Bumi dan Bangunan P2	-	-	-	#DIV/0!
11 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	#DIV/0!
	-	-	-	#DIV/0!

Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah tidak saja berasal dari transaksi penerimaan kas tetapi juga berasal dari transaksi penerbitan surat ketetapan pajak yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 Wajib Pajak belum memenuhi kewajibannya dikurangi dengan realisasi kas yang bukan merupakan pendapatan 2018 (piutang tahun 2017).

Berikut rincian penerimaan pajak daerah berdasarkan jenis pajak selama tahun 2017 :

No	<i>Pendapatan Pajak Daerah:</i>	Penerimaan Kas (LRA)	Piutang 2018	Piutang 2017	Pendapatan diterima dimuka 2017	Pendapatan diterima dimuka 2018	Total
1	Pajak Hotel						-
2	Pajak Restoran						-
3	Pajak Hiburan						-
4	Pajak Reklame						-
5	Pajak Penerangan Jalan						-
6	Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan						-
7	Pajak Parkir						-
8	Pajak Air Tanah						-
9	Pajak Sarang Burung Walet						-
10	Pajak Bumi dan Bangunan P2						-
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan						-
		-	-	-	-	-	-



3.3.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari :

	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/(Penurunan)	
			Rp	%
Hasil Retribusi Daerah:				
Retribusi Jasa Umum				
Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	-	-	#DIV/0!
Retribusi Pelayanan persampahan/ kebersihan	-	-	-	#DIV/0!
Retr bi cetak KK,KTP & akte Capil	-	-	-	#DIV/0!
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jln	-	-	-	#DIV/0!
Retribusi Pelayanan Pasar	-	-	-	#DIV/0!
Retribusi Pengujian Kendrn Bermotor	-	-	-	#DIV/0!
Retribusi Pengendalian Menara	-	-	-	#DIV/0!
	-	-	-	#DIV/0!
Retribusi Jasa Usaha				
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	-	#DIV/0!
Retribusi Tempat Pelelangan	-	-	-	#DIV/0!
Retribusi terminal	-	-	-	#DIV/0!
Retribusi Tempat Khusus Parkir	-	-	-	#DIV/0!
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedot Kakus	-	-	-	#DIV/0!
Retribusi Rumah Potong Hewan	-	-	-	#DIV/0!
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	-	-	-	#DIV/0!
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahrag	-	-	-	#DIV/0!
Retribusi Siaran Radio Abirawa	-	-	-	#DIV/0!
	-	-	-	#DIV/0!
Retribusi Perizinan Tertentu				
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	-	-	#DIV/0!
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	-	-	-	#DIV/0!
Retribusi Izin Trayek	-	-	-	#DIV/0!
Retribusi Izin Usaha	-	-	-	#DIV/0!
Retribusi IMTA	-	-	-	#DIV/0!
	-	-	-	#DIV/0!
Jumlah Hasil Retribusi Daerah	-	-	-	#DIV/0!

Pendapatan retribusi yang diterima oleh Kas Daerah sebesar Rp. 0,-
sedangkan berdasarkan hak yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten



Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018

Batang adalah sebesar Rp. 0,- Terdapat selisih sebesar Rp. 0,- dengan penjelasan sebagai berikut :

No	<i>Pendapatan Retribusi Daerah</i>	Penerimaan Kas (LRA)	Piutang 2018	Piutang 2017	Pendapatan diterima dimuka 2017	Pendapatan diterima dimuka 2018	Total
	Retribusi Jasa Umum						
	Retribusi Pelayanan Kesehatan						-
	Retribusi Pelayanan persampahan/ kebersihan						-
	Retribusi cetak KK, KTP & akte Capil						-
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jln						-
	Retribusi Pelayanan Pasar						-
	Retribusi Pengujian Kendrn Bermotor						-
	Retribusi Pengendalian Merara						-
	Jumlah	-	-	-	-	-	-
	Retribusi Jasa Usaha						
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah						-
	Retribusi Tempat Pelanggaran						-
	Retribusi terminal						-
	Retribusi Tempat Khusus Parkir						-
	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedot Kakus						-
	Retribusi Rumah Potong Hewan						-
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan						-
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga						-
	Retribusi Siaran Radio Abirawa						-
	Jumlah	-	-	-	-	-	-
	Retribusi Perijinan Tertentu						
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan						-
	Retribusi Izin Gangguan/ Keramaian						-
	Retribusi Izin Trayek						-
9	Retribusi Izin Usaha						-
10	Retribusi IMTA						-
	Jumlah	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Hasil Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	- 39



3.3.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama tahun 2017 adalah sebesar Rp. 0,- mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0% bila dibandingkan dengan pendapatan yang diterima selama tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 0,- Berikut rincian pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan selama tahun 2017 :

<i>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:</i>		Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	%
<i>Bagian Laba atas Penyertaan Modal</i>					
1	Perusahaan Daerah Air Minum	-	-	-	#DIV/0!
2	Perusda Aneka Usaha	-	-	-	#DIV/0!
3	BPR/BKK Batang	-	-	-	#DIV/0!
4	Koperasi Serba Usaha Batang Cemerlang	-	-	-	#DIV/0!
5	Bank Jateng	-	-	-	#DIV/0!
		-	-	-	#DIV/0!

Pendapatan atas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang masuk ke Kas Daerah tahun 2017 adalah sebesar Rp. 0,- sedangkan berdasarkan hak yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Batang sebesar Rp. 0,- terdapat selisih sebesar Rp. 0,- Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

<i>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:</i>		Penerimaan Kas(LRA)	Kenaikan investasi	Penurunan investasi	Pendapatan- LO
<i>Bagian Laba atas Penyertaan Modal</i>					
1	Perusahaan Daerah Air Minum	-	-	-	-
2	Perusda Aneka Usaha	-	-	-	-
3	BPR/BKK Batang	-	-	-	-
4	Koperasi Serba Usaha Batang Cemerlang	-	-	-	-
5	Bank Jateng	-	-	-	-
		-	-	-	-



3.3.1.1.4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

Akun Pendapatan Asli Daerah lainnya merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pendapatan Asli Daerah lainnya yang diterima selama tahun 2018 adalah sebesar Rp. 0,- mengalami kenaikan /penurunan sebesar Rp. 0,- atau 0% bila dibandingkan dengan yang diterima pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 0,- Berikut rincian Pendapatan Asli Daerah Lainnya selama tahun 2018 :

<i>Pendapatan Asli Daerah Lainnya</i>	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Hasil Penjualan Aset Daerah Tidak Dipisahkan	-	-	-	#DIV/0!
Penerimaan Jasa Giro	-	-	-	#DIV/0!
Penerimaan Bunga Deposito	-	-	-	#DIV/0!
Tuntutan Ganti Rugi Daerah	-	-	-	#DIV/0!
Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Denda Retribusi	-	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Denda Pajak	-	-	-	#DIV/0!
Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan	-	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Dari Pengembalian Fasilitas Sosial dan fasilitas	-	-	-	#DIV/0!
Pendapatan BLUD	-	-	-	#DIV/0!
Pendapatan BPJS Keshtn	-	-	-	#DIV/0!
	-	-	-	#DIV/0!

Pendapatan Asli Daerah Lainnya sebesar Rp. 0,- adalah merupakan hak yang diakui OPD Dispermades Pemerintah Kabupaten Batang, sedangkan realisasi pendapatan di Kas Daerah adalah sebesar Rp. 0,- Terdapat selisih sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :



Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018

<i>Pendapatan Asli Daerah Lainnya</i>	Penerimaan Kas	Piutang 2017	Piutang 2016	Pendapatan	Pendapatan	Pendapatan-LO
				diterima dimuka 2016	diterima dimuka 2017	
Hasil Penjualan Aset Daerah Tidak Dipisahkan		-	-	-	-	-
Penerimaan Jasa Giro		-	-	-	-	-
Penerimaan Bunga Deposito		-	-	-	-	-
Tuntutan Ganti Rugi Daerah		-	-	-	-	-
Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		-	-	-	-	-
Pendapatan Denda Retribusi		-	-	-	-	Berikut
Pendapatan Denda Pajak		-	-	-	-	ini penjelasan
Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan		-	-	-	-	-
Pendapatan Dari Pengembalian Fasilitas Sosial dan fasilitas umum		-	-	-	-	-
Pendapatan BLUD		-	-	-	-	-
Pendapatan BPJS Keshtn		-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

masing-masing obyek Lain-lain Pendapatan yang sah.

3.3.1.1.5. Pendapatan Hibah.

Pendapatan Hibah SKPD OPD Dispermades tahun 2018 sebesar Rp. 0,- berasal dari :

3.3.2. BEBAN

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya potensi manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan, beban transfer dan beban



lain-lain. Selama tahun 2018, Beban OPD Dispermades adalah sebesar Rp. 6.045.257.156,- dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp. 6.493.202.941,-, mengalami penurunan sebesar Rp. 447.945.785,- atau 6,90%.

Berikut realisasi beban 2018 dibandingkan tahun 2017 :

<i>Beban</i>	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Pegawai	2.499.458.803,00	2.562.367.758,00	(62.908.955,00)	97,54
Beban Persediaan	459.746.577,00	521.722.850,00	(61.976.273,00)	(88,12)
Beban Jasa	2.050.495.935,00	2.164.688.018,00	(114.192.083,00)	94,72
Beban Pemeliharaan	155.598.717,00	181.787.500,00	(26.188.783,00)	85,59
Beban Perjalanan Dinas	611.353.215,00	785.021.436,00	(173.668.221,00)	77,88
Beban Hibah	80.300.000,00	104.200.000,00	(23.900.000,00)	77,06
Beban Penyisihan Piutang	-	-	-	-
Beban Penyusutan dan	188.303.909,00	173.415.379,00	14.888.530,00	108,59
Beban Lain-lain	-	-	-	-
Beban Barang dan Jasa BLUD	-	-	-	-
	<u>6.045.257.156,00</u>	<u>6.493.202.941,00</u>	<u>(447.945.785,00)</u>	<u>93,10</u>

3.5.2.1. Beban Pegawai

Beban pegawai adalah beban Pemerintah daerah dalam pengeluaran yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban pegawai Pemerintah Kabupaten Batang pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 2.562.367.758,- apabila dibandingkan dengan beban pegawai pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 1.757.780.633,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 804.587.125,- atau naik sebesar 45,77%. Beban pegawai tersebut termasuk di dalamnya beban pegawai BLUD.



Rincian beban pegawai tersebut terdiri dari :

<i>Beban Pegawai</i>	Nominal (Rp)
Gaji dan Tunjangan PNS	1.743.552.946,00
Tambahan Penghasilan PNS	748.395.957,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimp & Angg DPRD Serta	
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
Uang Lembur	7.509.900,00
Belanja Pegawai BLUD	
	2.499.458.803,00

3.3.2.1. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah beban Pemerintah Kabupaten Batang dalam bentuk pemakaian persediaan dalam jangka waktu tertentu.

Beban persediaan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 459.746.577,- sedangkan pada tahun 2017 beban persediaan adalah sebesar Rp. 521.722.850,- sehingga berkurang sebesar Rp. 62.976.273,- atau 11,88%.

Beban Persediaan terdiri dari :

<i>Beban Persediaan</i>	Nominal (Rp)
Bahan Pakai Habis	302.098.077,00
Bahan Material	60.798.500,00
Cetak dan Penggandaan	
Jasa Konsultasi	
Belanja brg dan jasa yg diserahkan ke masy	96.850.000,00
	459.746.577,00

3.3.2.2. Beban Jasa

Beban jasa merupakan beban Pemerintah Kabupaten Batang dalam bentuk pengadaan jasa dari pihak ketiga yang memiliki keahlian dan pelayanan jasa tertentu untuk membantu melaksanakan kegiatan Pemerintah daerah.

Beban jasa pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 2.164.688.018,- sedangkan pada tahun 2017 beban jasa adalah sebesar Rp. 2.164.688.018,- sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp. 412.639.267,- atau naik 123,55%.



Beban Jasa terdiri dari :

<i>Beban Jasa</i>	Nominal (Rp)
Honorarium PNS	378.025.000,00
Honorarium Non PNS	644.500.000,00
Jasa Kantor	79.862.777,00
Premi Asuransi	-
Cetak dan Penggandaan	273.399.700,00
Sewa	65.660.000,00
Makan Minum	487.080.500,00
Pakaian dinas	15.042.000,00
Belanja Kursus dan Sosialisasi	11.950.000,00
Jasa Konsultasi	-
Survey dan Penyusunan Design	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD	-
Belanja JKN	-
Belanja Jasa Narasumber	95.000.000,00
Belanja Telp, listrik air 2018	(24.042,00)
	<hr/> <hr/>
	2.050.495.935,00

3.3.2.3. Beban Pemeliharaan.

Beban pemeliharaan merupakan beban Pemerintah Kabupaten Batang yang terjadi sebagai akibat dari pemeliharaan atas aset tetap Pemerintah daerah yang bersifat tidak menambah nilai.

Beban pemeliharaan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 155.598.717,- sedangkan pada tahun 2017 beban pemeliharaan adalah sebesar Rp. 181.787.500,- sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 26.188.783,- atau turun sebesar 14,41%.

Beban pemeliharaan tahun 2017 terdiri dari :

<i>Beban Pemeliharaan</i>	Nominal (Rp)
Perawatan Kendaraan bermotor	121.899.517,00
Pemeliharaan gedung, dll	33.699.200,00
	<hr/> <hr/>
	155.598.717,00



3.3.2.4. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas merupakan beban Pemerintah Kabupaten Batang yang terjadi sebagai akibat adanya PNS atau pegawai yang dipekerjakan yang melakukan perjalanan dinas.

Beban perjalanan dinas pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 611.353.215,- sedangkan pada tahun 2017 beban perjalanan dinas adalah sebesar Rp. 785.021.436,- sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 173.668.221,- atau turun sebesar 22,12 %.

<i>Beban Perjalanan Dinas</i>	Nominal (Rp)
Perjalanan Dinas	611.353.215,00
	<u>611.353.215,00</u>

3.3.2.5. Beban Hibah

Beban hibah adalah beban Pemerintah daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah daerah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban hibah pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 80.300.000,- sedangkan pada tahun 2017 beban hibah adalah sebesar Rp. 104.200.000,- sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 23.900.000,- atau turun sebesar 22,94%

Beban hibah terdiri dari :

<i>Beban Hibah</i>	Nominal (Rp)
Belanja barang yang diserahkan ke masyarakat	
Uang yang diberikan ke masyarakat	80.300.000,00
belanja hibah	
Hibah aset Disperindag	
Hibah Aset Dinas Kesehatan	
Hibah Aset Dinas Kelautan	
Hibah Dana BOS	
Hibah Block Grant	
	<u>80.300.000,00</u>



3.3.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap dan aset tak berwujud yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban penyusutan dan amortisasi pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 188.303.909,- sedangkan pada tahun 2017 beban penyusutan adalah sebesar Rp. 173.415.379,- sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp. 14.888.530,- atau naik sebesar 7,91%

3.3.2.7. Beban Penyisihan Piutang

Merupakan piutang yang disisihkan pada tahun 2018 sebesar Rp. 0,- Sedangkan pada tahun 2017 beban penyisihan piutang adalah sebesar Rp. 0,- sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 0,-

3.3.2.8. Beban Lain-lain.

Beban Lain-lain tahun 2018 sebesar Rp. 0,-

3.3.2.9. Beban Barang dan Jasa BLUD

Akun Beban barang dan jasa BLUD menjadi akun tersendiri karena di dalamnya terdapat beban persediaan, perjalanan dinas, pemeliharaan dan jasa BLUD. Beban barang dan jasa BLUD RSUD tahun 2018 sebesar Rp. 0,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 0,-

3.3.3. SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL

Dalam kegiatan operasional Tahun 2018, berdasarkan realisasi pendapatan sebesar Rp. 0,- dan realisasi beban Rp. 6.045.257.156,- maka OPD Dispermades mengalami defisit sebesar Rp. 6.045.257.156, Apabila dibandingkan dengan defisit tahun 2017 sebesar Rp. 6.493.202.941,- maka terjadi penurunan sebesar Rp. 448.019.535,- atau turun sebesar 6,90 %. Seperti dijelaskan dalam tabel berikut ini :

<i>Uraian</i>	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan	-	-	-	#DIV/0!
Beban	6.045.257.156,00	6.493.202.941,00	(447.945.785,00)	93,10
Jumlah	(6.045.257.156,00)	(6.493.202.941,00)	447.945.785,00	93,10



3.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Komponen Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dan Ekuitas Akhir.

3.4.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal OPD Dispermades Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 906.061.417,- Nilai ini merupakan Ekuitas Akhir Tahun 2017.

3.4.2. Surplus/Defisit –LO

Surplus/Defisit-LO OPD Dispermades Tahun 2018 adalah sebesar Rp. –6.045.257.156,- yang dihasilkan dari transaksi menutup akun Surplus/Defisit-LO

3.4.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2018 merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas pada tahun 2018.

Koreksi-koreksi tersebut sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

<i>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar</i>	31 Desember 2018 (Rp)
A Koreksi Nilai Perubahan	-
B Koreksi Ekuitas Lainnya	5.602.139.264,00
1 Penambahan AT dari Pindahan Antar Rekening	18.400.000,00
2 Pengurangan AT karena Mutasi ke OPD lain	(109.537.920,00)
3 Pengurangan AT karena Extracountable	(450.000,00)
4 Pengurangan AT karena Pindahan Antar Rekening	(18.400.000,00)
5 Perhitungan akumulasi penyusutan	-
6 Perhitungan hutang retensi	
7 Perhitungan hutang beban	
8 Koreksi nilai piutang	
9 Koreksi nilai penyisihan piutang	
10 Perhitungan Hutang Jangka Pendek Lainnya	
11 Perhit. Bagian Lancar Hutang Jk.Panjang	
12 Perhit. Hutang Jk.Panjang	
13 Koreksi Pendapatan	
14 Perhit.bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	
15 Hibah aset tetap PPKD	
16 Defisit penjualan aset tetap	
17 Perhitungan dana BOS	
18 Koreksi tagihan angsuran penjualan kios	
19 Akumulasi penyusutan aset lain-lain	
20 Pembulatan koma	
	<u>5.492.151.344,00</u>



Berikut Penjelasan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Dalam Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2018 :

3.4.3.1. Penambahan aset tetap

Penambahan aset tetap sebesar Rp. 109.350.000,- , terdiri dari :

- a) Penambahan Aset Tetap dari Belanja Modal Rp. 109.350.000,-

3.4.3.2. Pengurangan Aset Tetap

Pengurangan aset tetap sebesar Rp. 109.537.920,- terdiri dari :

Pengurangan Aset Tetap	31 Desember 2018 (Rp)
Pengurangan karena penghapusan	-
Pengurangan karena Mutasi ke SKPD Lain	109.537.920,00
Pengurangan karena Hibah	-
Pengurangan karena SK Koreksi	-
Pengurangan karena rusak berat	-
Pengurangan karena extracountable	-
Pengurangan karena pindahan antar rekening	-
Pengurangan karena Lain-lain	-
Jumlah	<u>109.537.920,00</u>

3.4.3.3. Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Dihapuskan.

Akun Perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap yang dihapuskan sebesar Rp. 0,- merupakan akumulasi penyusutan aset tetap sampai dengan tahun asset tersebut dihapus.

3.4.3.4. Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ke SKPD Lain

Akun Perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap ke SKPD lain sebesar Rp. 0,- merupakan total akumulasi penyusutan atas aset tetap yang dimutasikan ke SKPD lain berada pada SKPD sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:



SKPD	<u>31 Desember 2018 (Rp)</u>
Dinas Cipta Karya dan TRK	-
Badan Lingkungan Hidup	-
Bagian Pemerintahan Desa	-
Bagian Umum	-
Sekretariat DPRD	-
DPPKAD	-
Inspektorat	-
Badan Kepegawaian Daerah	-
Dinas Pertanian	-
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-
Dinas Perindustrian	-
Jumlah	-

3.4.3.5. Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dari SKPD Lain

Akun Perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap dari SKPD lain sebesar Rp. 0,- merupakan total akumulasi penyusutan atas aset tetap yang diperoleh dari SKPD lain. Perinciannya dijelaskan **dalam tabel berikut ini** :

SKPD	<u>31 Desember 2018 (Rp)</u>
BRSUD	
Bagian Pemerintahan Desa	-
Dinas Perhubungan	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Bagian Umum	-
DPPKAD	
Inspektorat	
Badan Kepegawaian Daerah	
Kecamatan Limpung	
Kecamatan Tersono	
Kecamatan Warungasem	
Kecamatan Banyuputih	
Kelurahan Sambong	
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
Dinas Kehutanan dan Perkebunan	
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
Jumlah	<u><u>-</u></u>



3.4.3.6. Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ke Aset Lainnya.

Akun Perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap ke aset lainnya berasal dari aset tetap yang berubah kondisi menjadi rusak berat. Karena semula tercatat sebagai aset tetap sehingga akumulasi penyusutan di aset tetap berkurang yang berdampak pada penambahan ekuitas, seluruhnya sebesar Rp. 0,-.

3.4.3.7. Perhitungan Hutang Retensi.

Pembayaran hutang retensi oleh OPD Dispermades sebesar Rp. 0,- menyebabkan penambahan ekuitas.

3.4.3.8. Perhitungan Hutang Beban.

Hutang beban sebesar Rp. 0,- adalah kurang catat atas hutang belanja listrik, telpon air pada OPD Dispermades.

3.4.3.9. Koreksi Nilai Penyisihan Piutang

Terdapat koreksi nilai penyisihan piutang sebesar Rp. 0,-

3.4.3.10. Perhitungan hutang jangka pendek lainnya

Perhitungan hutang jangka pendek lainnya sebesar Rp. 0,- merupakan pembayaran hutang retensi dan hutang belanja.

3.4.3.11. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Akumulasi amortisasi asset tak berwujud tahun 2017 sebesar Rp. 0,- merupakan akumulasi amortisasi software oracle pada DPPKAD sebesar Rp. 0,- & akumulasi amortisasi software simonev pada Bagian Pengendalian Pembangunan sebesar (Rp. 0,-), akumulasi amortisasi software simpus pada kantor Perpustakaan dan Arsip daerah sebesar (Rp. 0,-).

3.4.3.12. Akumulasi Penyusutan Asset Lain-Lain (Rusak Berat)

Akumulasi Penyusutan Asset Lain-Lain (Rusak Berat) tahun 2017 sebesar Rp 0,-.

Akumulasi penyusutan asset lain-lain (Rusak Berat) sebesar (Rp. 0,-) merupakan selisih total akumulasi penyusutan asset rusak berat/aset lainnya



tahun 2018 dengan akumulasi penyusutan asset rusak berat/asset lainnya tahun 2017

.

3.4.3.13. Pembulatan Koma

Pembulatan koma tahun 2018 sebesar (Rp. 0,-) merupakan pengurangan ekuitas akibat perhitungan decimal.

3.4.4. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 822.943.525,- dan apabila dibandingkan dengan Ekuitas Akhir Tahun 2017 sebesar Rp. 906.135.167,- maka mengalami penurunan sebesar Rp. 83.117.892,- atau turun sebesar 9,17%.



BAB V

PENUTUP

Sebagai upaya memperbaiki pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Batang telah melakukan berbagai upaya perbaikan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Upaya-upaya tersebut diantaranya melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan, dan pembaruan terhadap peraturan pengelolaan keuangan daerah.

Laporan Keuangan OPD Dispermades dimaksudkan untuk memberikan informasi secara menyeluruh mengenai pelaksanaan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018 dan posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang tanggal 31 Desember 2017 serta kinerja Pemerintah Kabupaten Batang tahun 2018 pada OPD Dispermades.

Selanjutnya informasi dalam Laporan Keuangan ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun anggaran yang akan datang, serta pengambilan keputusan lainnya.

Demikian Laporan Keuangan OPD Dispermades Tahun 2018. Melalui laporan keuangan ini diharapkan secara bertahap terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Batang, 31 Desember 2018

KEPALA DISPERMADES KAB. BATANG

Drs. TULYONO, M.Si
NIP. 19600603 198003 1 002